



---

**KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>**

STIT Muhammadiyah Kediri

[nerissaarviana66@gmail.com](mailto:nerissaarviana66@gmail.com)

**Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

[mbaksantringinagung@gmail.com](mailto:mbaksantringinagung@gmail.com)

**Hisam Asngari<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

[hisamtreggalek@gmail.com](mailto:hisamtreggalek@gmail.com)

***Abstrak***

Kebijakan stabilisasi harga merupakan salah satu bentuk kebijakan mikro ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan keterjangkauan harga serta menjaga kestabilan tingkat konsumsi masyarakat, terutama pada komoditas kebutuhan pokok. Ketidakstabilan harga yang berlebihan berpotensi menurunkan daya beli dan memengaruhi pola konsumsi masyarakat, sehingga campur tangan pemerintah pada level mikro diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro serta dampaknya terhadap konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis dokumen kebijakan dan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjaga stabilitas konsumsi apabila diterapkan secara adil dan proporsional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan intervensi harga diperbolehkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan, menegakkan prinsip keadilan, dan mencegah terjadinya distorsi pasar. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga perlu disertai dengan pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan inefisiensi pasar dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

***Kata Kunci:*** Stabilisasi Harga, Mikro Ekonomi, Konsumsi Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Islam

***Abstract***

*Price stabilization policy represents a form of microeconomic policy implemented by the government to ensure price affordability and maintain the stability of public consumption, particularly for essential commodities. Excessive price instability may reduce purchasing*

# KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup>  
*power and affect consumption patterns, thereby requiring government intervention at the micro level to preserve market equilibrium. This study aims to examine micro-level price stabilization policies and their impacts on public consumption from an Islamic economics perspective. The research employs a qualitative approach using policy document analysis and a literature review of relevant academic sources. The findings indicate that price stabilization policies can provide consumer protection and sustain consumption stability when implemented in a fair and proportionate manner. From the perspective of Islamic economics, price intervention is permissible as long as it is intended to achieve public welfare (maslahah), uphold the principle of justice, and prevent market distortions. Therefore, the implementation of price stabilization policies must be accompanied by effective supervision to avoid market inefficiencies and remain consistent with Islamic economic principles.*

**Keywords:** price stabilization, microeconomics, public consumption, government policy, Islamic economics

## PENDAHULUAN

Dalam kajian mikro ekonomi, harga menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai indikator utama dalam proses interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Perubahan harga memiliki dampak langsung terhadap keputusan konsumsi masyarakat, terutama pada barang kebutuhan pokok yang tingkat elastisitasnya relatif rendah. Apabila terjadi fluktuasi harga yang signifikan dan tidak terkendali, kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat serta berpotensi mengganggu kesejahteraan konsumen dan stabilitas pasar. Oleh sebab itu, upaya menjaga kestabilan harga menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan mikro ekonomi pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam implementasinya, pemerintah menjalankan berbagai instrumen kebijakan stabilisasi harga, antara lain melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET), pemberian subsidi, serta pelaksanaan operasi pasar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berlebihan sekaligus mempertahankan stabilitas tingkat konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, dalam teori mikro ekonomi, intervensi pemerintah terhadap harga sering menjadi perdebatan karena berpotensi menimbulkan inefisiensi pasar apabila tidak dirancang dan diawasi secara optimal.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018), 70–72.

<sup>2</sup> Hal R. Varian, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th ed., 33–35.

# KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup>  
Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme pasar pada prinsipnya dihargai dan dibiarkan berjalan secara wajar. Namun demikian, Islam memberikan ruang bagi negara untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi praktik ketidakadilan, penimbunan, atau distorsi harga yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan intervensi harga dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah terjadinya kezaliman, serta mewujudkan kemaslahatan umum.<sup>3</sup> Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro dapat dipahami sebagai instrumen yang sah selama pelaksanaannya selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kajian mengenai kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro dan pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran kebijakan harga dalam menjaga keseimbangan pasar sekaligus mendukung tercapainya tujuan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro serta pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan kebijakan, konsep, dan pemikiran secara mendalam melalui data bersifat deskriptif dan normatif, bukan pada pengukuran statistik.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti dokumen kebijakan pemerintah, buku teks ekonomi mikro, literatur ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas stabilisasi harga dan perilaku konsumsi.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islām* (Cairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), 45–47.

<sup>4</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 183–185.

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3–5.

# KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup>  
Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur digunakan untuk menelaah teori-teori mikro ekonomi, konsep stabilisasi harga, serta pandangan ekonomi Islam terkait intervensi pasar, sementara analisis dokumen difokuskan pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan stabilisasi harga, seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET), subsidi, dan operasi pasar.<sup>6</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, serta mengaitkan temuan dengan konsep mikro ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan stabilisasi harga terhadap konsumsi masyarakat serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.<sup>7</sup>

Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan dokumen kebijakan yang berbeda. Melalui langkah tersebut, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak kebijakan stabilisasi harga terhadap konsumsi masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama pada kelompok konsumen yang bergantung pada barang kebutuhan pokok. Dalam teori mikro ekonomi, harga merupakan variabel utama yang memengaruhi keputusan konsumsi individu maupun rumah tangga. Ketika harga berada pada tingkat yang relatif stabil, konsumen memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga tingkat konsumsi dapat dipertahankan secara konsisten. Sebaliknya, fluktuasi harga

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225–227.

<sup>7</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31–33.

<sup>8</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), 301–303.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> yang tajam cenderung menurunkan daya beli dan mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.<sup>9</sup>

Kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah, seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET), subsidi, dan operasi pasar, bertujuan untuk mengendalikan *volatilitas harga* dan menjaga keterjangkauan barang kebutuhan pokok. Dari perspektif mikro ekonomi, kebijakan ini memengaruhi kurva permintaan konsumen. Harga yang lebih terkendali memungkinkan konsumen untuk tetap melakukan pembelian sesuai kebutuhan tanpa harus mengurangi jumlah konsumsi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga berperan sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Selain itu, stabilitas harga juga berdampak pada stabilitas konsumsi masyarakat secara agregat. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting dalam perekonomian yang berkontribusi terhadap keseimbangan pasar. Apabila harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan yang tinggi, rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian konsumsi dengan mengurangi pembelian atau beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kesejahteraan konsumen, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan stabilitas pasar.<sup>10</sup>

### 2. Kebijakan stabilisasi harga dan keseimbangan permintaan–penawaran

Meskipun kebijakan stabilisasi harga memberikan manfaat bagi konsumen, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pasar apabila tidak dirancang secara tepat. Dalam teori mikro ekonomi, penetapan harga di bawah harga keseimbangan pasar dapat menyebabkan kelebihan permintaan. Ketika harga ditahan pada tingkat tertentu sementara permintaan meningkat, produsen mungkin tidak memiliki insentif yang cukup untuk

---

<sup>9</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018), 70–72.

<sup>10</sup> Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, 9th ed. (Boston: Pearson Education, 2018), 89–92.

## KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> meningkatkan produksi, sehingga pasokan menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelangkaan barang di pasar.<sup>11</sup>

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak lanjutan, seperti antrean panjang, praktik penimbunan, atau munculnya pasar gelap. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diiringi dengan kebijakan pendukung yang memastikan ketersediaan pasokan. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan stabilisasi harga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian harga dan kelancaran distribusi barang.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga perlu diterapkan secara fleksibel dan kontekstual. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi pasar, struktur biaya produksi, serta kemampuan produsen dalam memenuhi permintaan. Apabila kebijakan harga diterapkan tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, tujuan awal untuk melindungi konsumen justru dapat berbalik menjadi sumber inefisiensi pasar. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga harus dirancang secara komprehensif agar dapat menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

### 3. Kebijakan stabilisasi harga dalam perspektif ekonomi islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pasar pada dasarnya dihargai sebagai sarana alami dalam menentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran. Islam mengakui kebebasan berusaha dan transaksi selama berlangsung secara adil dan tidak mengandung unsur penipuan, penimbunan, maupun eksploitasi. Namun demikian, kebebasan pasar tersebut tidak bersifat mutlak. Negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi apabila mekanisme pasar tidak berjalan secara adil dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.<sup>14</sup>

Pemikiran Ibn Taymiyyah memberikan landasan normatif bagi intervensi pemerintah dalam penetapan harga (*tas'ir*). Menurutnya, intervensi harga dibenarkan ketika terjadi praktik ketidakadilan, seperti penimbunan (*ihthikar*) atau lonjakan harga

---

<sup>11</sup> Hal R. Varian, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th ed. (New York: W. W. Norton & Company, 2014), 247–249.

<sup>12</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018), 154–156.

<sup>13</sup> Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, 9th ed., 382–384.

<sup>14</sup> Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 118–120.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> yang tidak wajar akibat manipulasi pasar. Dalam kondisi demikian, pemerintah berkewajiban untuk mengembalikan harga pada tingkat yang adil demi melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan pasar dan kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

Selain itu, konsep hisbah dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya pengawasan pasar untuk memastikan berjalannya transaksi secara jujur dan adil. Pengawasan ini mencakup pengendalian praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar, termasuk manipulasi harga dan distribusi yang tidak merata. Dalam konteks kebijakan stabilisasi harga, peran hisbah tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengawasi distribusi barang, mencegah penimbunan, serta memastikan bahwa kebijakan harga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.<sup>16</sup>

Berdasarkan perspektif tersebut, kebijakan stabilisasi harga dalam ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Selama kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, intervensi harga dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, stabilisasi harga pada tingkat mikro merupakan instrumen kebijakan yang relevan dalam kerangka ekonomi Islam apabila diterapkan secara proporsional dan bertanggung jawab.<sup>17</sup>

#### **4. Implikasi kebijakan stabilisasi harga terhadap keadilan dan kemaslahatan**

Implikasi kebijakan stabilisasi harga tidak hanya dapat dilihat dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga dari aspek keadilan dan kemaslahatan sosial. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama kebijakan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stabilisasi harga yang efektif dapat membantu menjaga keterjangkauan barang kebutuhan pokok, sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat memenuhi

<sup>15</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fī al-Islām* (Cairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), 45–47.

<sup>16</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 87–90.

<sup>17</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), 62–64.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> kebutuhan dasarnya. Kondisi ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.<sup>18</sup>

Namun demikian, kebijakan stabilisasi harga juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak dirancang secara inklusif. Misalnya, penetapan harga yang terlalu rendah tanpa mempertimbangkan biaya produksi dapat merugikan produsen kecil dan menurunkan insentif produksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mengurangi pasokan barang dan merugikan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen agar tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam pasar.<sup>19</sup>

Chapra menegaskan bahwa kebijakan ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada pencapaian masalah yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa kebijakan stabilisasi harga tidak cukup hanya menekan harga dalam jangka pendek, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan pendukung, seperti peningkatan efisiensi produksi, penguatan distribusi, dan pengawasan pasar yang efektif. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan stabilisasi harga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung tercapainya keseimbangan pasar yang adil dan berkelanjutan.<sup>20</sup>

### 5. Sintesis pendekatan mikro ekonomi dan prinsip ekonomi islam dalam kebijakan stabilisasi harga

Sintesis antara pendekatan mikro ekonomi dan prinsip ekonomi Islam menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro memiliki landasan teoritis dan normatif yang saling melengkapi. Dalam analisis mikro ekonomi, kebijakan harga dipandang sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar yang timbul akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, praktik monopoli, maupun gangguan distribusi. Ketika mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan

---

<sup>18</sup> Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 215–217.

<sup>19</sup> Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, 9th ed. (Boston: Pearson Education, 2018), 382–384.

<sup>20</sup> Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 140–142.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> harga yang efisien dan adil, intervensi pemerintah menjadi diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi konsumen.<sup>21</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi harga tidak hanya dipahami sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam menilai kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga dinilai sah selama bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan, terutama terhadap kelompok masyarakat lemah.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga dapat diposisikan sebagai jembatan antara tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dari sudut pandang mikro ekonomi, kebijakan ini membantu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, sedangkan dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan tersebut berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial dan pencegahan ketidakadilan pasar. Integrasi kedua pendekatan ini memperkuat *legitimasi* kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro selama dilaksanakan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan umum.<sup>23</sup>

### 6. Tantangan implementasi kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro

Meskipun kebijakan stabilisasi harga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan informasi pasar yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam praktik mikro ekonomi, penetapan kebijakan harga yang efektif membutuhkan data yang akurat mengenai biaya produksi, struktur pasar, serta elastisitas permintaan dan penawaran. Ketidaktepatan informasi dapat menyebabkan kebijakan harga tidak sesuai dengan kondisi riil pasar dan berpotensi menimbulkan distorsi.<sup>24</sup>

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah sering kali menghambat efektivitas kebijakan stabilisasi harga. Kebijakan harga yang tidak diiringi dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan dapat memicu

---

<sup>21</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 52–55.

<sup>22</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 101–103.

<sup>23</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, edisi ke-5* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 278–280.

<sup>24</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 146–148.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> kelangkaan barang atau praktik penimbunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pasar.<sup>25</sup>

Dari perspektif ekonomi Islam, tantangan implementasi kebijakan stabilisasi harga juga berkaitan dengan aspek etika pelaku pasar. Kebijakan harga akan sulit mencapai tujuan kemaslahatan apabila pelaku ekonomi mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, selain regulasi formal, diperlukan penguatan etika bisnis Islam agar aktivitas pasar dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

### 7. Relevansi kebijakan stabilisasi harga terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, kebijakan stabilisasi harga memiliki relevansi yang tinggi mengingat struktur konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh kebutuhan pokok. Kenaikan harga pangan secara signifikan dapat secara langsung menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas konsumsi dan ketahanan ekonomi rumah tangga.<sup>27</sup>

Kebijakan seperti penetapan harga eceran tertinggi dan operasi pasar mampu memberikan perlindungan jangka pendek terhadap lonjakan harga. Namun demikian, dari sudut pandang mikro ekonomi, kebijakan tersebut hanya akan efektif apabila didukung oleh ketersediaan pasokan dan sistem distribusi yang efisien. Tanpa dukungan kebijakan struktural yang memperkuat produksi dan distribusi, stabilisasi harga cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.<sup>28</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan stabilisasi harga di Indonesia dapat dipandang sebagai wujud peran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Selama kebijakan tersebut diarahkan untuk mencegah ketidakadilan dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, stabilisasi harga merupakan instrumen yang sah dan relevan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai

---

<sup>25</sup> Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 214–216.

<sup>26</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 87–90.

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022), 11–13.

<sup>28</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Analisis Teoretis dan Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 167–169.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup>  
alat pengendalian ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan  
kemaslahatan sosial sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam.<sup>29</sup>

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas konsumsi masyarakat, khususnya pada barang kebutuhan pokok. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen mikro ekonomi yang mampu melindungi konsumen dari fluktuasi harga yang berlebihan serta membantu mempertahankan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Dengan harga yang relatif stabil, pola konsumsi masyarakat dapat terjaga sehingga turut mendukung keseimbangan pasar.

Namun demikian, kebijakan stabilisasi harga juga memiliki potensi menimbulkan ketidakseimbangan pasar apabila tidak dirancang dan dilaksanakan secara tepat. Penetapan harga yang tidak mempertimbangkan kondisi permintaan dan penawaran serta struktur biaya produksi dapat menyebabkan kelangkaan barang dan inefisiensi pasar. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan stabilisasi harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan, efisiensi distribusi, serta pengawasan pasar yang memadai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam penetapan harga dipandang sah apabila dilakukan untuk mencegah ketidakadilan, penimbunan, dan distorsi pasar yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan distributif.

Secara keseluruhan, kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas konsumsi dan keseimbangan pasar

---

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 221–223.

## **KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup> apabila diterapkan secara proporsional, disertai pengawasan yang efektif, serta selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kebijakan yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dan nilai-nilai keadilan Islam berpotensi memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, pemerintah disarankan untuk merancang kebijakan stabilisasi harga pada tingkat mikro secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan pengendalian harga sebaiknya tidak hanya difokuskan pada penetapan harga semata, tetapi juga diiringi dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat pengawasan pasar. Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai tanpa menimbulkan distorsi pasar seperti kelangkaan barang atau penurunan insentif produksi.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga. Sinergi antara kebijakan harga, kebijakan produksi, dan kebijakan distribusi sangat penting agar stabilisasi harga dapat berjalan secara efektif. Penguatan sistem informasi pasar yang akurat dan transparan juga diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil permintaan dan penawaran di pasar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, disarankan agar kebijakan stabilisasi harga senantiasa berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan harga tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga tidak merugikan produsen, khususnya produsen kecil. Penguatan fungsi pengawasan pasar yang mencerminkan konsep hisbah menjadi penting untuk mencegah praktik penimbunan, manipulasi harga, dan perilaku ekonomi yang tidak etis.

**KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup>

**Daftar Pustaka**

- Adiningsih, Sri. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFPE, 2012.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, Muhammad Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fī al-Islām*. Cairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2018.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Pindyck, Robert S., dan Daniel L. Rubinfeld. *Microeconomics*. 9th ed. Boston: Pearson Education, 2018.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tambunan, Tulus T. H. *Perekonomian Indonesia: Analisis Teoretis dan Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Varian, Hal R. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2014.

**KEBIJAKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT MIKRO DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Nerissa Arviana Fadhila<sup>1</sup>, Silvia Maulidatul Umah<sup>2</sup>, Hisam Asngari<sup>3</sup>  
Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.